



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl.Ahmad Yani Pasar Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), menunjukkan bahwa :

1. Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkadadengan target 100 % realisasi capaian kinerja 100 %
2. Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan dengan target 90 % realisasi capaian kinerja 100 %
3. Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target 100 % realisasi capaian kinerja 100 % ini menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik

Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025, menunjukkan bahwa Capaian realisasi kinerja tercapai 100 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pata tahun 2025, masih ada hambatan/permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya :

1. SDM yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat belum dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Sehingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas belum dilakukan secara maksimal.
3. Sarana dan prasarana penunjang belum tersedia secara memadai
4. Masih kurangnya tenaga PPNS

Akhirnya semoga LKjIP Satpol PP Tahun 2025 dapat bermanfaat serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satpol PP Kota Bengkulu dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa menerangi, meridhoi dan melindungi jalan kita menuju kebaikan.

Bengkulu , 27 Februari 2026

**KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



DR. SADIAT MARULITUA SITUMORANG, AP. MM

**Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 197608121994121001**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr Wb.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun. Proses kinerja Satpol PP Kota Bengkulu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Satpol PP Kota Bengkulu.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhirnya kami berharap semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa merestui dan tetap bersama kita. Aamiin

Bengkulu , 27 Februari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



DR. SAPAT MARULITUA SITUMORANG, AP. MM

**Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 197608121994121001**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Keadaan Pegawai	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	9
1.6 Keuangan	11
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	23
3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	28
3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah	29
3.1.4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	30
3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan.....	32
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
3.2 Realisasi Keuangan	38
BAB VII PENUTUP.....	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	8
1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	8
1.4	Sarana dan Prasana Pada Satpol PP Kota Bengkulu Tahun 2025	11
1.5	Pagu Anggaran Tahun 2025	11
1.6	Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025	12
1.7	Anggaran Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	12
2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	18
2.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3	Indikator Kinerja Utama	19
2.4	Perjanjian Kinerja	20
3.1	Pengukuran Kinerja Satpol PPTahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
3.2	Sub Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	25
3.3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025	26
3.4	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	28
3.3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	25
3.4	Analisi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	27
3.5	Nilai AKIP Satpol PP Kota Bnegkuu Tahun 2023 dan 2024	29
3.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah	29
3.7	Realisasi dan Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
3.8	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri RI Tahun 2025-2029	31
3.9	Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Target (Renstra Kemendagri 2025-2029)	31
3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	38
3.12	Realisasi Anggaran Tahun 2025	39
3.13	Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2024 dann 2025	42

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Grafik Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2023	7
3.1	Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	38
3.2	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran	41





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pasal 255 ayat 1 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Satpol PP berperan aktif dalam melaksanakan tugas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disempurnakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 4 berbunyi setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir



dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara harus melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjaaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan setiap tahunnya wajib untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai terhadap pengukuran kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai.
2. Menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

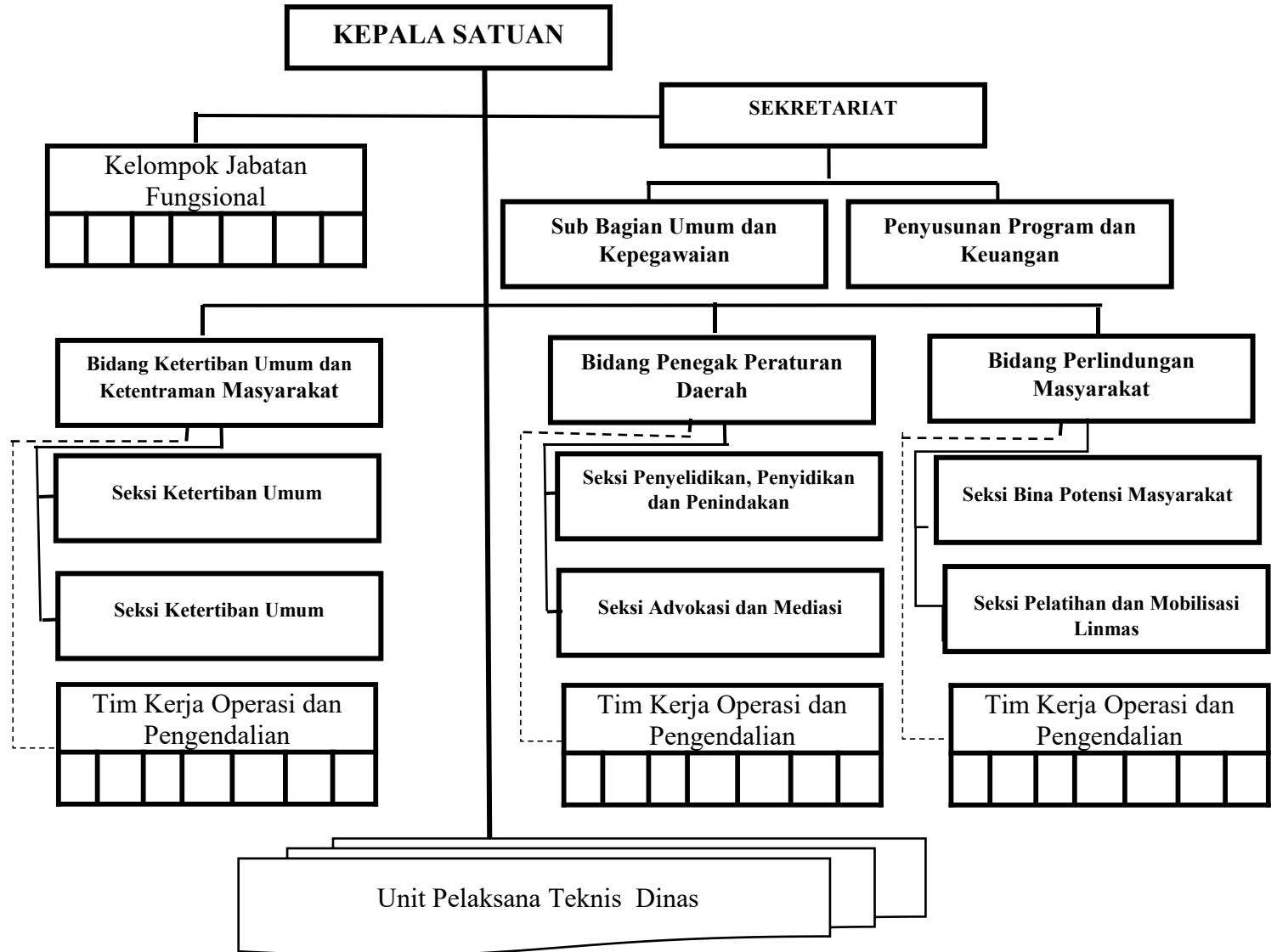
Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas ::

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Ketentraman Masyarakat
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penegak Peraturan Daerah
 - a. Seksi Advokasi dan Mediasi
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penindakan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Seksi Bina Potensi masyarakat
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Struktur organisasiSub Bagian Satuan Polisi Pamong Praja





Satpol PP Kota Bengkulu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat
- f. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 Isu Strategis

Sejalan dengan upaya penataan kinerja, maka keamanan dan ketertiban di Kota Bengkulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di Kota Bengkulu. Di era otonom daerah dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan.



Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Perda dan Perkada yang dibuat oleh Pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya aparat yang mengawal bahwa Perda dan Perkada tersebut dilaksanakan serta dipatuhi baik oleh masyarakat, badan hukum maupun aparat itu sendiri.

Isu strategis yang terkait dengan pencapaian tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bengkulu adalah belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tahun 2025 yaitu :

- a. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas
 - Kurangnya tenaga PPNS, hal ini berpengaruh pada proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
 - Keterbatasan sarana dan prasarana
- b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masih adanya perspektif negatif terhadap Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah
 - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
 - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat



Prioritas Satuan Polisi Pamong Kota Bengkulu dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan Tibumtrammas serta perlindungan masyarakat adalah :

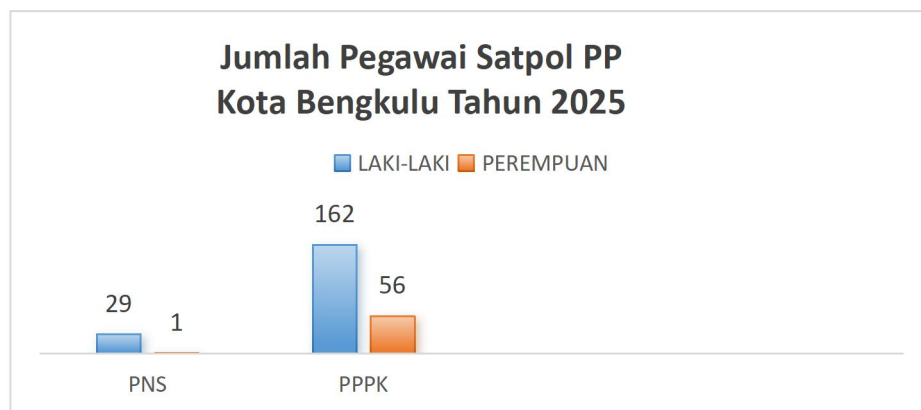
- a. Mengoptimalkan kinerja pegawai / anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam pelaksanaan tugas-tugas
- b. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana Satpol PP
- c. Penegakan perda yang lebih humanis sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat
- d. Menjalin koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan aparatir penegak hukum lainnya termasuk dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah trantibum

1.4 Keadaan Pegawai

Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. PNS : 30 orang
- b. PPPK : 218 orang

Grafik 1.1
Grafik Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2025





Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS			PPPK			Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Strata 3 (S3)	1	-	1	-	-	-	1
2	Strata 2 (S2)	5	-	5	-	-	-	5
3	Strata 1 (S1)	13	2	15	29	18	47	62
4	Diploma III (D3)	-	-	-	1	1	2	2
5	Diploma II (D2)	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma I (D1)	-	-	-	-	-	-	-
6	SLTA	9	-	9	133	36	169	178
7	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	2	30	163	55	218	248

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	3	-	3
4	Eselon IV a	7	1	8
5	Eselon IV b	-	-	-
6	Staf	16	1	17
	Jumlah	28	2	30

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda/ Ia	-	-	-
2	Juru Muda Tk I/ I b	-	-	-
3	Juru / I c	-	-	-
4	Juru Tingkat I / I d	-	-	-
5	Pengatur Muda / II a	-	-	-
6	Pengatur Muda Tk.I / II b	-	-	-
7	Pengatur / II c	-	-	-
8	Pengatur Tk.I / II d	5	-	5
9	Penata Muda / III a	4	1	5
10	Penata Muda Tk.I / III b	-	-	-
11	Penata / III c	4	-	4
12	Penata Tk.I / III d	8	1	9
13	Pembina / IV a	5	-	5
14	Pembina Tingkat I/ IV b	1	-	1
15	Pembina Utama Muda / IV c	1	-	1
16	Pembina Utama Madya/ IV d	-	-	-
17	Pembina Utama / IV e	-	-	-
	Jumlah	28	2	30



1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kota Bengkulu menempati gedung kantor di Jalan A.Yani Kel.Kebun Keling Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu.

Sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor paling sedikit terdiri atas :

1. Ruang kerja pimpinan dan staf
2. Ruang pos jaga
3. Ruang rapat
4. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan
5. Ruang penyimpanan barang / gudang
6. Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil
7. Ruang sidang majelis kode etik
8. Tempat apel / upacara
9. Halaman parkir

b. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional yang dimaksud terdiri atas :

1. Sepeda motor
2. Mobil jenis offroad/jeep
3. Mini bus
4. Truk kecil
5. Truk sedang
6. Truk besar
7. Serta jenis kendaraan lain



c. Perlengkapan Operasional

Perlengkapan operasional dimaksud paling sedikit terdiri atas perlengkapan :

1. Perorangan

Perlengkapan perorangan meliputi :

- a. Pakaian dinas
- b. Tonfa dan holster tonfa
- c. Borgol
- d. Tameng
- e. Senter
- f. Ferplas
- g. Tas atau ransel
- h. Sleeping bag
- i. Jaket
- j. Rompi / body protector
- k. Masker

2. Beregu

Perlengkapan beregu merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu, perlengkapan ini dapat berupa matras, tenda pleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi. Namun saat ini perlengkapan ini belum ada di Satpol PP.

3. Patroli

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas patroli.

4. Penegakan perda dan perkara

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Penegakan perda dan perkara

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana di Satpol PP Kota Bengkulu cukup memadai untuk pelaksanaan tugas-tugas. Berikut rincian daftar sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kota Bengkulu :



Tabel 1.4
Sarana dan Prasana Pada Satpol PP Kota Bengkulu
Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	GEDUNG KANTOR		
1	Gedung kantor	1 unit	Baik, bukan milik sendiri
2	Pos Jaga	1 unit	Pos jaga di Pasar Minggu (Kondisi butuh perbaikan)
B	KENDARAAN OPERASIONAL		
1	Kendaraan dinas roda 4	5 unit	BD 1094 CY, 1683 AY, BD 9156 AY, BD 1140 CY, BD 1858 CY
2	Kendaraan patroli roda 4	4 unit	BD 9159 AY, BD 9280 AY, BD 9454 AY, BD 9455 AY
3	Kendaraan Dalmas/truk	1 unit	BD 8093 AY
4	Kendaraan roda 2	13 unit 2 unit	BD 5546 CY, BD 2465 CY, BD 2463 CY, BD 2466 CY, BD 5811 AY, 5815 AY, BD 6210 AY, BD 2467 CY, BD 4031 AY, 2462 CY, BD 6232 AY, BD 6952 AY, BD 6335 XX, BD 5763 XX
C.	PERLENGKAPAN OPERASIONAL		
1	Tameng	30 Buah	Baik
2	Helm	17 Buah	Baik
3	Pistol	3 Buah	Baik
4	Scoter elektrik	5 unit	Baik
5	Hooverboard	2 unit	Baik
6	Sepeda lipat	1 unit	Baik

1.6 Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Bengkulu dibiayai dari APBD Kota Bengkulu Tahun 2025

Tabel 1.5
Pagu Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	10.281.657.984	9.279.820.774	90,26
5.1	BELANJA OPERASI	10.199.657.984	9.197.820.774	90,18
5.1.01	Belanja Pegawai	6.377.881.205	5.895.654.236	92,44
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.821.776.779	3.302.166.538	86,40
5.2	BELANJA MODAL	82.000.000	82.000.000	100
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	82.000.000	82.000.000	100



Tabel 1.6
Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025

Uraian Belanja	Pagu Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/Kurang
BELANJA DAERAH	10.785.143.721	10.281.657.984	- 503.485.737
BELANJA OPERASI	10.595.675.221	10.199.657.984	- 396.017.237
Belanja Pegawai	4.607.864.221	6.377.881.205	1.770.016.984
Belanja Barang	5.987.811.000	3.821.776.779	2.166.034.221
BELANJA MODAL	189.468.500	82.000.000	- 98.448.500
Belanja Peralatan dan Mesin	9.020.000	82.000.000	- 9.020.000

Di tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 10.281.657.984,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.279.820.774,- dengan rincian dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1.7
Anggaran Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.423.745.734	8.840.826.044
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.844.329	6.805.250
	Sub Kegiatan :		
	● Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3.062.329	3.043.250
	● Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	0	-
	● Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.483.000
	● Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.282.000	1.279.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.528.865.205	6.032.597.236
	-Sub Kegiatan :		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.377.881.205	5.895.654.236
	- Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.484.000	134.446.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.497.000



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	262.000.000 200.000.000 62.000.000	254.779.810 193.299.810 61.480.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Fasilitasi kunjungan tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.989.800 685.000 15.495.800 2.400.000 1.000.000 33.409.000	39.240.872 685.000 15.495.800 2.400.000 - 20.660.072
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Sub Kegiatan : - Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	82.000.000 82.000.000	82.000.000 82.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pelayanan umum	2.431.046.400 1.030.000 58.999.600 4.300.000 2.366.716.800	2.383.613.878 1.030.000 16.720.778 4.300.000 2.361.563.100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	41.788.998
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	60.000.000	41.788.998
2.	Program Peningkatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	857.912.500	438.994.730
	Sub Kegiatan :		
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.301.640	- 08.971.000
	- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	189.703.560	148.047.500
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	20.250.600	-
	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.950.000	-
	- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		
	- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah	4.212.800	-
		180.315.595	130.624.000



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
	- Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan pencegahan unjuk rasa dan kerusuhan massa - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	56.827.100	55.484.580
		6.000.000	-
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan: - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	189.171.400	37.457.600
		30.000.000	-
		59.171.400	9.989.500
		100.000.000	27.468.100
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	104.828.600	1.831.300
		104.828.600	1.831.300
	JUMLAH	10.282.657.984	9.279.820.774



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kota Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi.
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Keadaan Pegawai
- 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6 Keuangan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - 3.1.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
 - 3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah
 - 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang dilakukan
 - 3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan termasuk anggaran.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat undang-undang diatas, Satpol PP Kota Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026. Rencana strategis ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja



Kota Bengkulu merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai.

Tujuan dan Sasaran

**Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan PERKADA	Peningkatan Sosialisasi Dan Patroli Trantibmas
			Peningkatan Pengawasan Dan Penegakan Perda

**Tabel 2.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan Penegakan PERDA dan PERKADA yang Mendorong Akuntabilitas dan Kondusivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan	75%	80%	80%
			Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada}}{\text{Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Akibat Penegakan Hukum Perda Dan Perkada}} \times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda / Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\text{Penangan Penindakan Trantibumlinmas Yang Diselesaikan}}{\text{Pengaduan Trantibum Linmas Yang ditangani}} \times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen RR Pada Satpol PP Kota Bengkulu	Satpol PP Kota Bengkulu
			Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	LHE Inspektorat	Inspektorat Kota Bengkulu
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Satpol PP Kota Bengkulu

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2025.



**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	Persentase	100 %
		Jumlah Dokumen RR Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen	1 Dokumen
		Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	Nilai	BB
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi	2 Inovasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan juga Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan
- Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja kementrian/lembaga

Adapun cara Adapun cara menghi tung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Rumus 1 : Apabila semakin inggi realisasai menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja	Pemberian Atribut
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang ditetapkan



3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menetapkan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Satpol PP Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	93 %	93 %
	Jumlah Dokumen RR Satpol PP Kota Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	BB	BB	100 %
Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	2 Inovasi	2 Inovasi	100 %



Berdasarkan data Tabel. 3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada**

Persentase penindakan pelanggaran Perda dan Perkada dari target 100 % realisasi sebesar 100 % atau capaian kinerja sebesar 100 %

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase penindakan pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan. Untuk mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Penanganan Penindakan Trantibumlinmas Yang Diselesaikan}}{\text{Pengaduan Trantibum Linmas Yang ditangani}} \times 100$$

$$\frac{39}{39} \times 100 = 100$$

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari target yang telah ditetapkan di peroleh capaian sebesar 100 %, ini berarti bahwa target kinerja dapat dicapai 100 %. Dari 9 pengaduan yang masuk semuanya dapat diselesaikan.

➤ **Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi**

Persentase administrasi umum , prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang dipenuhi dari target 100 % realisasi sebesar 86 % atau capaian kinerja sebesar 93 %. Hal ini dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengukur indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Persentase administrasi umum , prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang dipenuhi..}}{\text{Persentase administrasi umum , prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang menjadi target}} \times 100$$

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{93}{100} \times 100 \% = 93 \%$$

Dapat dilihat bahwa dari target yang telah ditetapkan di peroleh capaian sebesar 93 %. Ini berarti bahwa target kinerja dapat dicapai 93 %. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu cukup baik dalam memenuhi sarana dan prasarana penunjang.



**Tabel 3.2
Sub Kegiatan Yang Tidak Terlaksana**

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Fasilitas kunjungan tamu	1.000.000	

➤ **Jumlah Dokumen RR Satpol PP Kota Bengkulu**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu (1) identifikasi risiko dan (2) analisis risiko

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai peraturan yang berlaku secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menyusun dokumen risk register sebagai upaya melaksanakan pengendalian atas risiko yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Dokumen Risk Register yang disusun berupa 1 (satu) dokumen risk register, sehingga target kinerja berupa 1 (satu) dokumen Risk Register dapat terpenuhi sesuai target, sehingga target kinerja tercapai 100 %.



➤ **Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu**

Nilai sakip dari target BB realisasi BB atau capaian kinerja sebesar 100 %. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bengkulu untuk Tahun diperoleh bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024 adalah 77,40 termasuk dalam kategori “BB”.

Tabel 3.3
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
Tahun 2024

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,25
	Jumlah	100	77,40

Dalam rangka perbaikan nilai sakip Kota Bengkulu, berikut hal-hal yang telah dilakukan :

- Menyusun dokumen sakip
- Merealisasikan target kinerja sesuai dengan indikator yang ada
- Mengevaluasi kembali kinerja yang belum tercapai

➤ **Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun**

Jumlah inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk Tahun 2025 di targetkan 2 (dua) inovasi, dari target tersebut bisa direalisasikan sejumlah 2 (dua) inovasi yaitu Satpol PP Sigap dan Satpol PP Humanis sehingga realisasi kinerja tercapai 100 %

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bengkulu, melakukan terobosan yang merupakan inovasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja



Kota Bengkulu mengusung 2 (dua) inovasi yaitu Satpol PP Sigap (Siap dan Tanggap) dan Satpol PP Humanis.

Satpol PP Sigap (Siap dan Tanggap), bertujuan memberi pemahaman yang kepada masyarakat bahwa Satpol PP bukan hanya siap dalam menegakan perda, perwal, pengamanan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat namun Satpol PP juga siap dalam menjalankan perannya yang lain diantara sigap dalam membantu penanggulangan bencana maupun penyelamatan serta selalu ada di masyarakat jika ada masyarakat yang tertimpa musibah (meninggal dunia) maupun pengamanan jika masyarakat membutuhkan pengamanan untuk keramaian (pesta pernikahan).

Satpol PP juga membuka layanan “ Lapor Satpol PP “ sebagai sarana bagi masyarakat untuk mempermudah laporan pengaduan bidang trantibum. Namun sejak layanan ini dibuka, laporan yang masuk cukup beragam tidak hanya masalah trantibum saja termasuk laporan tentang odgji, orang hilang, warga terlamtar, warga depresi, kabel PLN, dan lain-lain. Hal ini semuanya direspon oleh Satpol PP sebagai bagian dari pelayanan terhadap masyarakat.

Satpol PP Humanis perlu di sampaikan ke masyarakat dikarenakan citra Satpol PP dimata masyarakat termasuk buruk, masyarakat cenderung menganggap bahwa Satpol PP dalam bersikap dan bertindak lebih mengutamakan kekerasan dan arogansi. Hal inilah yang harus dihilangkan dari masyarakat, untuk melaksanakan tugas-tugasnya Satpol PP harus bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, hal ini bisa diwujudkan jika masyarakat menganggap Satpol PP adalah sahabat, bukan musuh mereka. Sehingga Satpol PP dalam setiap tindakannya harus lebih bersikap humanis dan santun.

Sikap humanis Satpol PP benar-benar teruji ketika sedang melaksanakan tugas lapangan seperti penertiban pedagang kaki lima ataupun pasar, pembongkaran warung remmang-remang dan cafe, penyitaan barang bukti karena sering kali menghadapi perlawanan dari pelanggar perda. Bukan hanya perlawanan tetapi juga hujatan bahkan



hantaman fisik dan pengancaman. Namun dalam menghadapi semua masalah dilapangan Satpol PP Kota Bnegkulu tetap mengedepankan sikap humanis dan persuasif dan tidak terpancing dengan provokasi yang ada.

3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya (Tahun 2024) dengan target kinerja sasaran tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025	Capaian Kinerja		% Capaian Kinerja 2025
				2024	2025	
1	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100 %	100%	100 %	100 %
2	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	%	100%	86 %	93%	93 %
3	Jumlah Dokumen Risiko (Risk Register) Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen	1	1	1	100 %
4	Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	Predikat	BB	BB	BB	100 %
5	Jumlah inovasi dalam 1 tahun	Buah	2	2	2	100%

Berdasarkan data Tabel. 3.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Persentase penindakan pelanggaran perda dan perkara**

Dari table 3.2 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024 dan 2025 terdapat kesamaan realisasi kinerja yaitu 100 % hal ini dapat diartikan bahwa kinerja 2 (dua) tahun berturut-turut untuk penegakkan perda adalah baik

➤ **Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi**

Ditahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebanyak 100 % dapat direalisasi sebesar 86 % dari target hal ini masih menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan di tahun 2025 capaian kinerja sebesar 93 % hal ini dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.



- Jumlah Dokumen Risk Register Satpol PP Kota Bengkulu
Jumlah dokumen risk register Satpol PP pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen dan di tahun 2025 juga 1 (satu) dokumen, ini berarti setiap tahunnya Satpol PP Kota Bengkulu selalu menyusun dokumen risk register
- Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu
Untuk nilai AKIP tahun 2023 Satpol PP kota Bengkulu mendapat predikat “BB” dengan nilai 74,40 sedangkan di tahun 2024 juga diperoleh hasil dengan predikat “BB” dengan nilai 77,40

Tabel 3.5
Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu
Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	20,10	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,25	20,25
	Jumlah	100	74,40	77,40

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tahun 2023 dan 2024 untuk Satpol PP Kota Bengkulu berkinerja sangat baik.

3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah

Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2025 dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama lima tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	100%
			Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan	85%	90%	95%
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%



Tabel 3.7
Realisasi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Indikator Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	100 %	100 %	-
		Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan	100 %	100 %	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	100 %	-

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja untuk tahun 2025 dapat terpenuhi dengan sangat baik, target tiga indikator yang telah ditetapkan di tahun 2025 dapat direalisasi sebesar 100 %. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan periode Renstra (2024-2026)

3.1.4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025-2029 (Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2025-2029), yang menjadi tujuan strategis adalah :

- ✧ Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan

Sedangkan yang menjadi sasaran strategis adalah :

- ✧ Meningkatkan kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas

Adapun visi, mis, tujuan dan sasaran strategis, Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.8
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri RI
Tahun 2025-2029

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Dalam Negeri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.	Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan.	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	75

Tabel 3.9
Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Target (Renstra Kemendagri 2025-2029)

No SS	Sasaran Strategis	No IKSS	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target					UKE I
					2025	2026	2027	2028	2029	
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	IKSS 4.3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Indikator Baru	75	77,5	80	82,5	85	Ditjen Bina Adwil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi indikator kinerja dari Kementrian Dalam Negeri adalah Indeks Penyelenggaraan Trantibum,inmas (IPT) dengan target kinerja di tahun 2025 adalah 75. Untuk realisasi kinerja sampai dengn saat ini kami belum medapatkan data/informasi terkait tentang realisasi kinerja tahun 2025 sehingga tidak dapat menyajikan data tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kota Bengkulu tahun 2025 disusun dengan mengacu pada IKU dan Perjanjian Kinerja yang penyusunannya masih berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel 2.3, 2.4 dan 3.9 dapat dilihat indikator kinerja Satpol PP Kota Bengkulu dan Kementrian Dalam Negeri. Jika dilihat tentu tidak ada kesamaan indikator sehingga tidak dapat membandingkan target dan capaian dari indikator tersebut, Indikator kinerja yang tertuang dalam IKU Satpol PP Kota Bengkulu dalam pelaksanaan merupakan proses untuk mencapai indeks penyelenggaraan tibuntranmas.



3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu pada tahun 2025 :

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendukung

➤ Dukungan dana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Satpol PP setiap tahunnya selalu di dukung dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Walaupun masih jauh dari ideal namun setidaknya mampu untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan. Dukungan dana yang cukup sangat diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian kinerja

➤ Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)

Semangat kerja dan loyalitas aparatur Satuan Polisi Pamong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat baik. Mulai menunjukan adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP baik dari segi kemampuan, pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi, termasuk tentang disiplin aparatur. Walaupun belum sepenuhnya tetapi sudah menunjukkan adanya peningkatan, tentunya masih harus terus ditingkatkan baik lewat pembinaan, evaluasi kinerja, rapat staf maupun dengan mengikuti pelatihan dan diklat

➤ Patroli Rutin

Pelaksanaan kegiatan patroli rutin dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga berbagai potensi gangguan



ketentraman dan ketertiban umum dapat segera terdeteksi dan ditangani

- Respon yang relatif cepat terhadap pengaduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum

b. Faktor Penghambat

- Kondisi sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran tugas-tugas dilapangan. Namun saat ini kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bengkulu belum cukup memadai. Di tahun 2025 Satpol PP Kota Bengkulu berpindah kantor, yang berada di kawasan Pasar Barukoto I sehingga membutuhkan penataan kembali. Saprass yang belum ada antara lain :

- ❖ Belum adanya gudang untuk menyimpan barang sitaan
- ❖ Belum adanya ruangan khusus untuk penyidik
- ❖ Belum adanya barak bagi anggota
- ❖ Masih kurangnya kendaraan patrol
- ❖ Masih kurangnya pos penjagaan yang layak

Solusinya adalah :

- Berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor dengan cara memasukkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
- Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menambah sarana dan prasarana
- Anggaran kegiatan yang masih minim
- Masih terbatasnya tenaga PPNS

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Pendukung

- Dukungan dari pimpinan daerah, memotivasi dan memberikan dukungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Satpol PP
- Koordinasi dan kerja sama antar dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota



Bengkulu khususnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran perda. Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD teknis terkait.

b. Faktor Penghambat

- Pemahaman dan ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang sehingga masih banyak adanya pelanggaran terhadap perda
- Kondisi ekonomi menjadi alasan paling sering ditemukan dalam pelanggaran perda, seperti sulitnya melakukan penertiban pasar

Solusi yang dilakukan:

- Melakukan penegakan Perda secara humanis, sehingga bisa mengurangi bentrok di lapangan dengan masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda juga akan semakin baik.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berupa sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya manusia terhadap indikator kinerja dengan cara melihat capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya yang digunakan. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya.

Anggaran Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sebesar Rp. 10.282.657.984,- yang terdiri dari 2 (dua) program 10 (Sepuluh) kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 9.279.820.774,- atau 90,3 %.

Jika dilihat dari kondisi sumber daya manusia dan kondisi sarana dan prasarana Satpol PP yang kurang tetapi dapat mencapai hasil kinerja yang baik menunjukkan bahwa ada usaha untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka pencapaian kinerja



Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Pagu	Realisasi	%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	10.282.657.984	9.279.820.774	90.3 %	9,7 %

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan di atas, bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Kota Bengkulu pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat baik. Keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Ada 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan 11 (sepuluh) sub kegiatan prioritas ditambah lagi 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan penunjang. Program/kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	857.912.250	438.994.730	51%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	483.561.295	334.156.080	69%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.301.640	-	0
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	189.703.560	148.047.500	78,0
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	20.250.600	-	0
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.950.000	-	0
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	4.212.800	-	0
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	180.315.595	130.624.000	72,4
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	56.827.100	55.484.580	97,6
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	6.000.000	-	0
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	370.030.955	104.838.650	28,3
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39.408.405	3.257.000	8
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	321.670.600	93.835.800	29,2
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.951.950	7.745.850	87
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	4.320.000	-	-
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.320.000	-	0

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.423.745.734	8.840.826.044	94%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.844.329	6.805.250	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.062.329	3.043.250	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.483.000	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.282.000	1.279.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.528.865.205	6.032.597.236	92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.377.881.205	5.895.654.236	92,4
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	148.484.000	134.446.000	90,5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.497.000	99,9
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262.000.000	254.779.810	97%
	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	193.299.810	96,6
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.000.000	61.480.000	99,2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.989.800	39.240.872	74%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	685.000	685.000	100,0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.495.800	15.495.800	100,0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000	2.400.000	100,0
	Fasilitas kunjungan tamu	1.000.000	-	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33.409.000	20.660.072	61,8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.000.000	82.000.000	100%
	Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	82.000.000	82.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.431.046.400	2.383.613.878	98%
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.030.000	1.030.000	100,0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	58.999.600	16.720.778	28,3
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.300.000	4.300.000	100,0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.366.716.800	2.361.563.100	99,8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	41.788.998	70%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dinas/operasional	60.000.000	41.788.998	69,6
	JUMLAH	10.281.657.984	9.279.820.774	90,3



3.2 Realisasi Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian Belanja	Pagu Anggaran		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/Kurang
BELANJA DAERAH	10.785.143.721	10.281.657.984	- 503.485.737
BELANJA OPERASI	10.595.675.221	10.199.657.984	- 396.017.237
Belanja Pegawai	4.607.864.221	6.377.881.205	1.770.016.984
Belanja Barang	5.987.811.000	3.821.776.779	2.166.034.221
BELANJA MODAL	189.468.500	82.000.000	- 98.448.500
Belanja Peralatan dan Mesin	9.020.000	82.000.000	- 9.020.000

Grafik 3.1
Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025





**Tabel 3.12
Realisasi Anggaran
Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.423.745.734	8.840.826.044	94%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.844.329	6.805.250	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.062.329	3.043.250	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.483.000	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.282.000	1.279.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.528.865.205	6.032.597.236	92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.377.881.205	5.895.654.236	92,4
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	148.484.000	134.446.000	90,5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.497.000	99,9
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262.000.000	254.779.810	97%
	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	193.299.810	96,6
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.000.000	61.480.000	99,2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.989.800	39.240.872	74%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	685.000	685.000	100,0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.495.800	15.495.800	100,0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000	2.400.000	100,0
	Fasilitas kunjungan tamu	1.000.000	-	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33.409.000	20.660.072	61,8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.000.000	82.000.000	100%
	Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	82.000.000	82.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.431.046.400	2.383.613.878	98%
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.030.000	1.030.000	100,0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	58.999.600	16.720.778	28,3
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.300.000	4.300.000	100,0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.366.716.800	2.361.563.100	99,8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	41.788.998	70%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dinas/operasional	60.000.000	41.788.998	69,6

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	857.912.250	438.994.730	51%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	483.561.295	334.156.080	69%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.301.640	-	0
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	189.703.560	148.047.500	78,0
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	20.250.600	-	0
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.950.000	-	0
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	4.212.800	-	0
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	180.315.595	130.624.000	72,4
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	56.827.100	55.484.580	97,6
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	6.000.000	-	0
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	370.030.955	104.838.650	28,3
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39.408.405	3.257.000	8
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	321.670.600	93.835.800	29,2
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.951.950	7.745.850	87
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	4.320.000	-	-
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.320.000	-	0
	JUMLAH	10.281.657.984	9.279.820.774	90,3



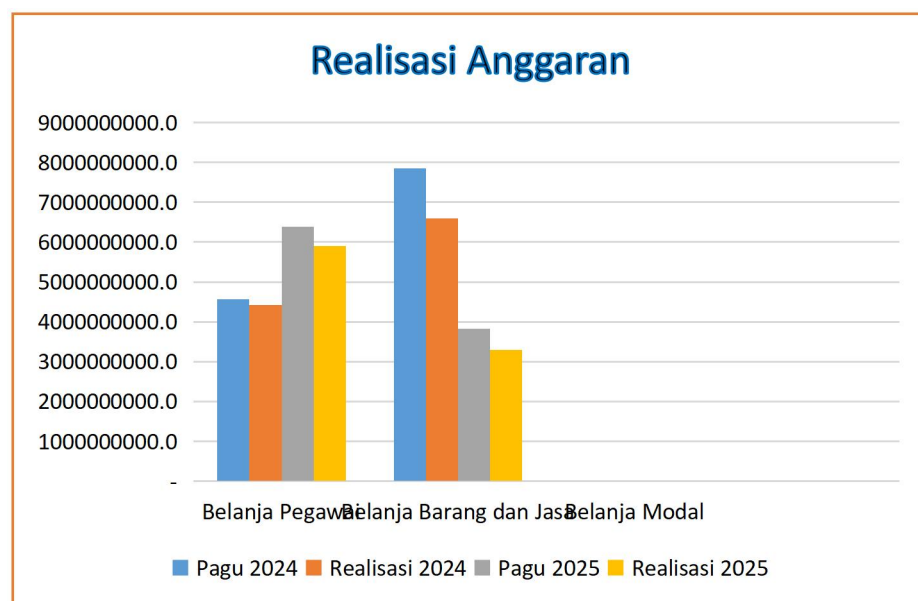
Di tahun 2025 ini total pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah Rp. 10.282.657.984,- terdiri 2 program, 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan realisasi anggaran 9.279.820.774,- atau 90,3 %.

Perbandingan anggaran dengan tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	2024			2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Daerah	12.484.687.884	11.072.813.572	88,7	10.281.657.984	9.279.820.774	90,3
	Belanja Operasi	12.425.816.684	11.018.042.372	88,7	10.199.657.984	9.197.820.774	90,2
1	Belanja Pegawai	4.567.947.632	4.425.497.817	96,9	6.377.881.205	5.895.654.236	92,4
2	Belanja Barang dan Jasa	7.857.869.052	6.592.544.555	83,9	3.821.776.779	3.302.166.538	86,4
	Belanja Modal	58.871.200	54.771.200	93,0	82.000.000	82.000.000	100,0
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.871.200	54.771.200	93,0	82.000.000	82.000.000	100,0

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran



Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk tahun 2025 baik secara kinerja ataupun secara anggaran dapat direalisasikan dengan baik. Dengan realisasi anggaran 90,3 %.



BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang. Selain itu LKjIP ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban laporan, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu di masa mendatang.

Bengkulu, 27 Februari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



DESAHAT MARULITUA SITUMORANG, AP.MM

**Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19760812 199412 1 001**

KENDARAAN DINAS SATPOL PP KOTA BENGKULU













KENDARAAN DINAS RODA DUA







PERLENGKAPAN OPERASIONAL





POS JAGA SATPOL PP



Menyampaikan Surat Teguran 1 (Satu) Disepanjang Jalan Jendral Sudirman Dan Jalan Kh. Ahmad Dahlan Khususnya Di Samping Kampus Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu Tanggal 10 Februari 2025





Menyampaikan Surat Teguran 2 (Dua) Disepanjang Jalan Jendral Sudirman Dan Jalan Kh. Ahmad Dahlan Khususnya Di Samping Kampus Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu Tanggal 13 Februari 2025



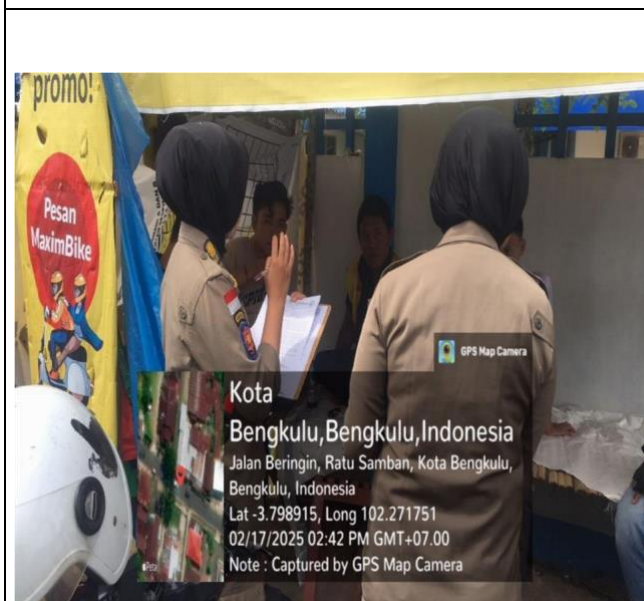
Melaksanakan Tugas Pendampingan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyelidikan (Pulbaket) Pedagang Kaki Lima Sepanjang Jl Kz Abidin 2 D Jl Cendana Belakang Pondok Tanggal 10 Januari 2025



Menyampaikan Surat Teguran 1 (Satu) Kepada Para Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar PERDA Di Jl Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Khususnya Didepan Kominfo Kota Bengkulu Pada Tanggal 10 Februari 2025



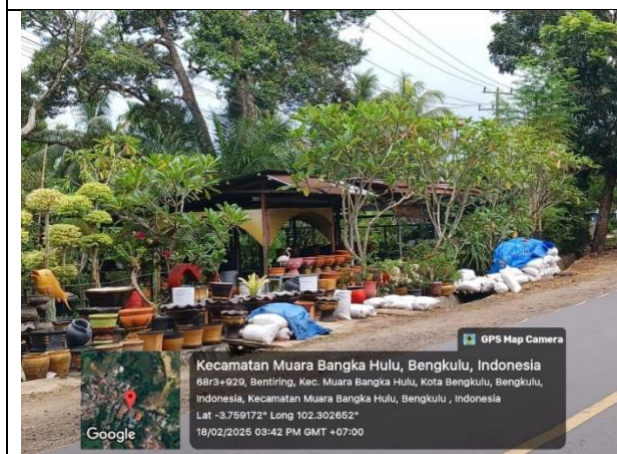
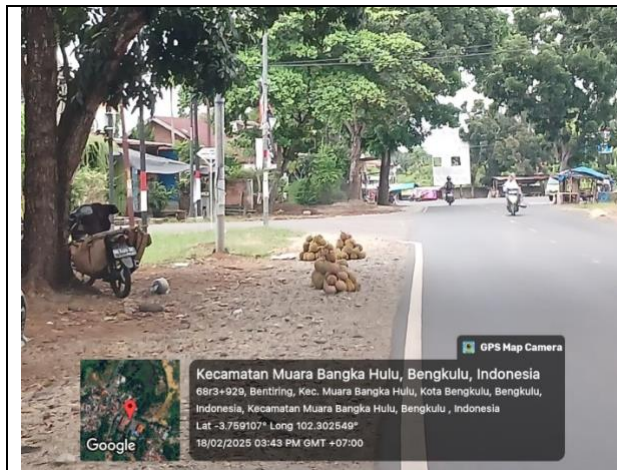
Menyampaikan Surat Teguran 2 (Dua) Kepada Para Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar PERDA Di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Khususnya Didepan Kominfo Kota Bengkulu Tanggal 17 Februari 2025



Menyampaikan Surat Teguran 3 (Tiga) Dan Pembongkaran Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar PERDA Di Jl Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Tanggal 17 April 2025



**Melaksanakan Tugas Pendampingan/Membantu Penyelidikan Pulbaket (PPNS) Di Depan
Kantor DPRD Kota Bengkulu Tanggal 18 Februari 2025
Perda Nomor 03 Tahun 2008**



**Menyampaikan Surat Teguran 1 (Satu) disepanjang jalan WR. Supratman depan kantor
DPRD Kota Bengkulu Tanggal 20 Februari 2025**





**Melaksanakan Tugas dan Melakukan Penertiban Kepada Anak Jalan, Gelandangan dan Pengemis yang Melanggar PERDA Di Persimpangan Lampu Merah Kota Bengkulu
Tanggal 15 April 2025**

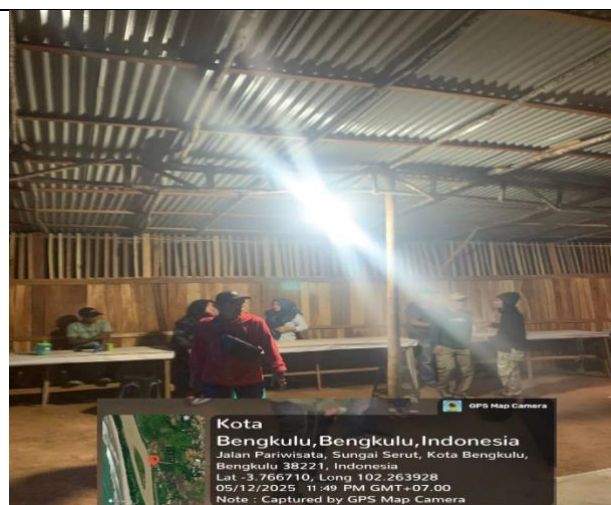




Melaksanakan Tugas Pendampingan PPNS dalam Melakukan Penyelidikan (Pulbaket)

Di Lingkungan Kel. Beringin Raya Hari Jumat Tanggal 12 Mei 2025





**Menyampaikan Surat Teguran 1 (Satu) Di Depan Rumah Sakit Gading Medika Jalan
Citandui Kota Bengkulu Tanggal 11 Juni 2025**





Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Perda Kota Bengkulu Terhadap
Usaha Pijat Tradisional Dan Hiburan Di Wilayah Kota Bengkulu
Pada Hari Senin 22 September 2025





SHOOTER BILLIARD



MTAK SR

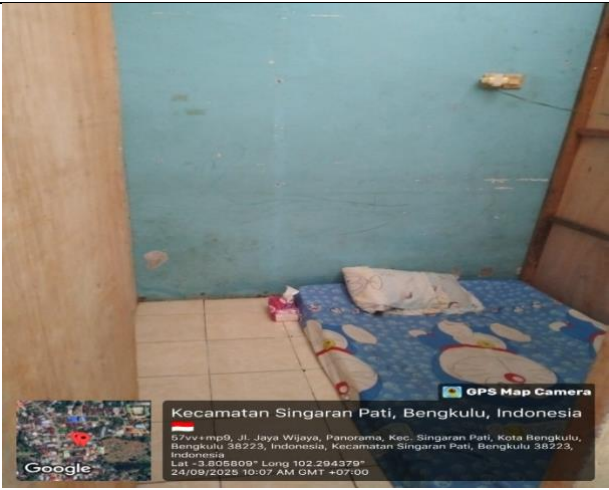
 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817498° Long 102.2888° 22/09/2025 01:55 PM GMT +07:00	 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817412° Long 102.288797° 22/09/2025 02:07 PM GMT +07:00
 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817498° Long 102.2888° 22/09/2025 02:15 PM GMT +07:00	 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817498° Long 102.2888° 22/09/2025 02:19 PM GMT +07:00
 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817486° Long 102.288766° 22/09/2025 02:22 PM GMT +07:00	 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817483° Long 102.288748° 22/09/2025 02:27 PM GMT +07:00
 Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu, Indonesia 57jq+wm7, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.817498° Long 102.2888° /09/2025 02:41 PM GMT +07:00	
CIMANUK BILLIARD	



Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Perda Kota Bengkulu Terhadap
Usaha Pijat Tradisional Dan Hiburan Di Wilayah Kota Bengkulu
Pada Hari Rabu 24 September 2025



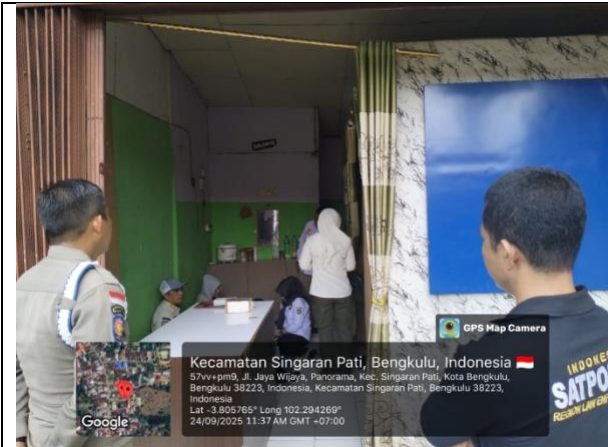
PIJAT LULUR BUNGA



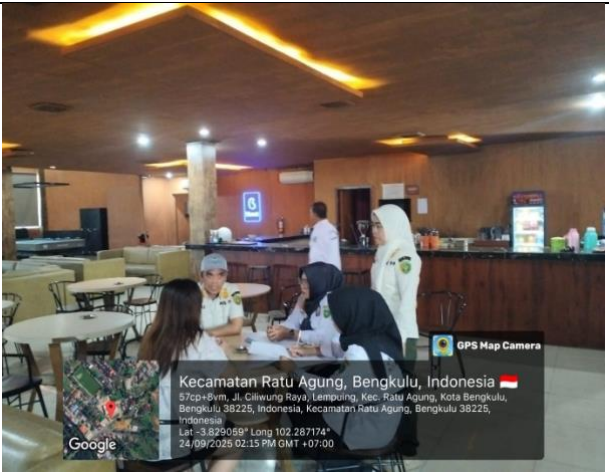
PIJAT FLOWER



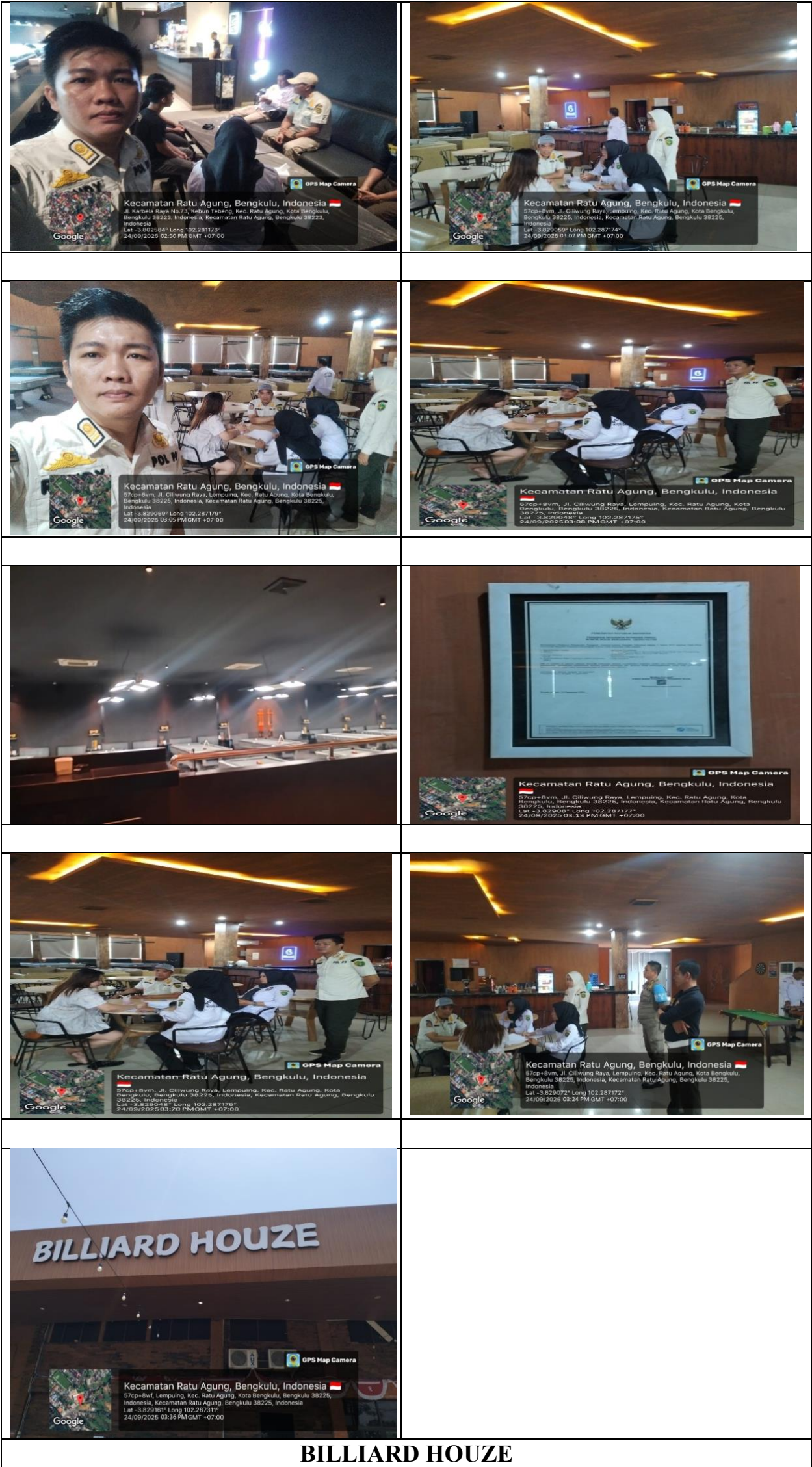
KLINIK FLOWER



PIJAT CAPEK CACA



R.BL BILLIARD



BILLIARD HOUZE

Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Perda Kota Bengkulu Terhadap
Usaha Pijat Tradisional Dan Hiburan Di Wilayah Kota Bengkulu
Pada Hari Jumat 26 September 2025





ATUN LULUR II





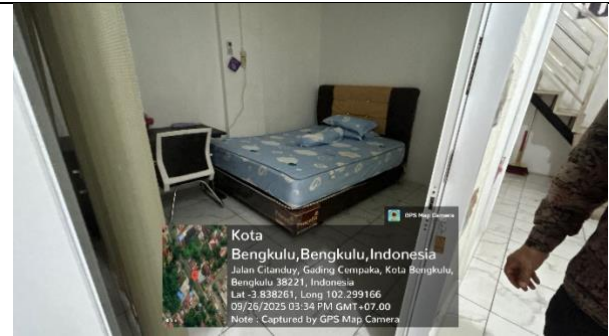
PIJAT CAPEK RATNA



 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834052, Long 102.293409 09/26/2025 01:28 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera	 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834041, Long 102.293420 09/26/2025 01:31 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera
 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834032, Long 102.293424 09/26/2025 01:36 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera	 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834040, Long 102.293412 09/26/2025 01:35 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera
 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834054, Long 102.293415 09/26/2025 10:43 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera	
PIJAT CAPEK PAK MIN	
 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834045, Long 102.294012 09/26/2025 02:15 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera	 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834047, Long 102.293576 09/26/2025 02:22 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera
 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834070, Long 102.294041 09/26/2025 02:55 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera	 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Jalan Jenggala, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Lat -3.834046, Long 102.293561 09/26/2025 02:40 PM GMT+07:00 Note - Captured by GPS Map Camera



PIJAT CAPEK EPI



RUMAH SINGGAH
GRAND CITANDUI

MELAKSANAKAN SOSIALISASI PERDA BERUPA PENYEBARAN
LEAFLET/BROSUR DI PERSIMPANGAN, BENCOOLEN MALL DAN FASILITAS
UMUM PADA HARI RABU 17 JUNI 2025



